



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKjIP) KECAMATAN PALIMANAN

TAHUN 2025

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palimanan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kecamatan Palimanan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palimanan, Februari 2026

PIL. CAMAT PALIMANAN



NIP. 19711218 199703 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palimanan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Palimanan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Palimanan Tahun 2025-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Palimanan yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan Indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan. Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 91,32%

Setelah Tujuan ditetapkan maka sasaran yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Palimanan dalam mencapai target kinerja ada sebagai berikut:

Sasaran OPD1: Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dengan indikatornya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 91,33%

Sasaran OPD 2: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum, dengan indikatornya Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan dan Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu , Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100%.

Sasaran OPD 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan, dengan indikatornya Persentase Nilai LAKIP Kecamatan Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 85,40%.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Palimanan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran program sebagai berikut:

a. Sasaran 1, diantaranya:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dengan indikatornya Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100%.

b. Sasaran 2, diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dengan indikatornya Presentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100%.

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Dengan indikatornya Presentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.
 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Dengan indikatornya Presentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100%.
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan indikatornya Presentase jumlah Desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 100%
- c. Sasaran 3, diantaranya:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan indikatornya Tingkat Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Palimanan kedepan, sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Palimanan harus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Masih belum menguasai Aparatur pemerintah Desa tentang Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes yang tepat waktu.
3. Masih belum tertibnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, baik anggaran Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, serta Pendapatan Asli Desa.
4. Masih belum tertibnya penataan Aset Desa.
5. Di Kecamatan Palimanan ada 12 Desa, 5 Desa berstatus Desa Mandiri dan 7 Desa bersatus maju, hal ini menjadikan motivasi untuk Kecamatan Palimanan agar bisa menaikkan status Desa diwilayah Kecamatan Palimanan menjadi desa mandiri.

DaftarIsi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	5
1.3 Isu-isu Strategis	5
1.4 Dukungan SDM,Sarana dan Prasarana dan Anggaran	6
1.5 Tindak lanjut LHE SAKIP	10
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Tujuan,Sasaran,dan Indikator Kinerja	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.3 Struktur Program dan Kegiatan	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	32
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	36
3.2.1 Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	36
3.2.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	39
3.2.3 MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaKecamatan Palimanan	43
BAB 4 PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja	48

BAB 1 PENADAHULUAN

Bab1Berisi:

1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Isu Strategis
4. Dukungan SDM' Sarana Prasarana dan Anggaran
5. Tindak lanjut LHE SAKIP
6. Sistematika SAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palimanan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palimanan Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Palimanan.
2. Mendorong Kecamatan Palimanan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Palimanan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Palimanan didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan Palimanan berpedoman pada Rencana Strategis 2025-2026 dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Cascading kinerja kecamatan Palimanan sebagai berikut :

Cascading

Visi RPD Tahun 2025-2026 “Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Bersih. Inovatif, Maju, Agamis dan Aman”

RPD

Misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional”

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Target 87,50 Prosen

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Palimanan

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Indikator Program :
Meningkatnya Prosentase
Kepatuhan dalam Pelaksanaan
SOP Pelayanan Pemerintah

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan
Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum

PROGRAM
PENYELENGGARA
AN
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN

Indikator Program :
Prosentase jumlah
Pelayanan yang
dilaksanakan sesuai
SOP

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

Indikator Program :
Prosentase
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan
Kelurahan yang
dilakukan

PROGRAM
KOORDINASI DAN
KETERTIBAN UMUM

Indikator Program :
Prosentase
Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum
yang dilakukan

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Program :
Prosentase jumlah
Urusan Pemerintahan
Umum yang ditugaskan
Kepala Pemerintah
Daerah kepada Camat

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Status Kemajuan
dan Kemandirian Desa

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Indikator Program :
Peningkatan Prosentase
Kegiatan Pembinaan
dan Pengawasan
terhadap Pemerintahan

Kecamatan Palimanan dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

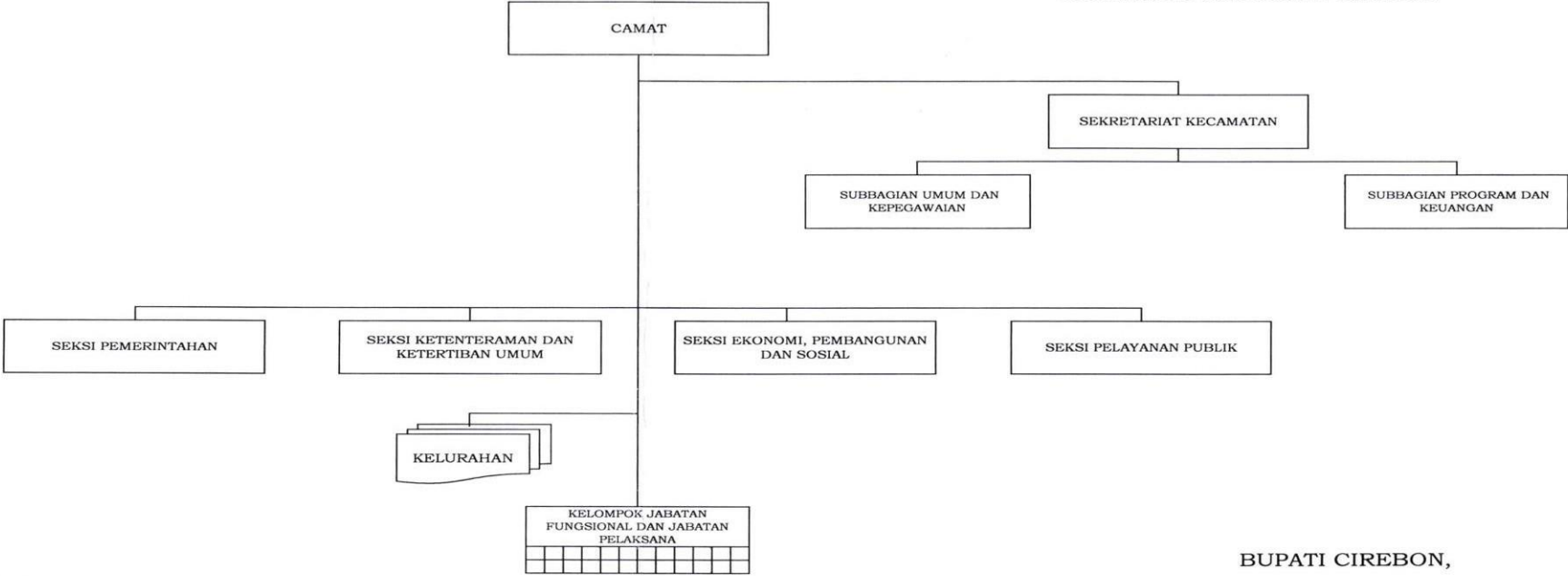
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Palimanan, terdiri atas;

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. SubBagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial
6. Seksi Pelayanan Publik
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
8. Kelurahan/Desa

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 159 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 159

BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

1.2.Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut:

1. Fungsi

- 1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - i. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;

2. Tugas

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Palimanan, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau
2. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur desa
4. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas
5. Pemutakhiran data penerima bantuan yang kurang akurat
6. Kurangnya pegawai yang berstatus PNS di Kantor Kecamatan Palimanan

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana,dan Anggaran

Pegawai Kecamatan Palimanan berjumlah sebanyak 21 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan
Tahun 2025

No	Jabatan	Pegawaiyangada		JenisKelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	S1	1	-
2	Sekretaris Camat	1	S1	1	-
3	Kepala Seksi	2	S1	2	-
4	Kepala Seksi	1	D3	-	1
5	Kepala Sub Bagian	2	S1	2	-
6	Staf/Pelaksana	2	S1	2	-
7	Staf/Pelaksana	2	S1	-	2
8	Staf/Pelaksana	6	SMA	6	-
9	Staf/Pelaksana	4	SMA	-	4
TOTAL		21		14	7

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Palimanan Tahun 2025

No	TingkatPendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Master(S2)	-	-	-
2	Sarjana (S1)	7	2	9
3	Diploma(D3/D4)	-	1	1
4	SLTA	6	4	10
5	SMP	-	-	-
TOTAL		13	7	20

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Pangkat/Golongan di Kecamatan Palimanan Tahun 2025

NO	GOLONGAN	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	IVB	-	-	-
2	IVA	1	-	1
3	IIID	2	1	3
4	IIIC	2	-	2
5	IIIB	-	-	-
6	IIIA	2	1	3
7	IID	-	-	-
8	IIC	-	-	-
9	IIB	-	-	-
10	II A	-	-	-
11	IX	-	2	2
12	V	1	2	3
TOTAL		8	6	14

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Palimanan memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran diantaranya Bangunan Gedung Kantor, Komputer, Printer, Meja Kerja, Kursi, Leptop, Filing cabinet, Dispenser, Musolah, Ruang Pelayanan Umum, dan lain lain dengan berbagai Kategori jenis Barang, ada yang kondisinya baik, rusak ringan, hingga rusak berat.

Data Sarana/Prasarana milik Kecamatan Palimanan Tahun 2025.

1.	AC Split	:	10 Unit
2.	Bangku Tunggu	:	3Buah
3.	Camera Digital	:	1Unit
4.	CCTV	:	1 Unit
5.	Clinical Thermometer	:	-
6.	Dispenser	:	1 Unit
7.	Filling Kabinet	:	2 Buah
8.	Gorden	:	-
9.	Handycam	:	1 Unit
10.	Kasur	:	1 unit
11.	Kipas Angin	:	5 Buah
12.	Kursi Besi/Metal	:	52 Buah
13.	Kursi Kerja Pejabat	:	13 Buah
14.	Kursi Putar	:	14 Buah
15.	Kursi Rapat	:	40 Buah
16.	Kursi Tamu	:	1 Unit
17.	Laptop	:	3 Unit
18.	LCD Projector	:	1 Unit
19.	Lemari Besi/Metal	:	8 Buah
20.	Lemari Es	:	1 Buah
21.	Lemari Kaca	:	1 Unit
22.	Meja ½ Biro	:	4 Buah
23.	Meja bundar	:	1 Buah
24.	Meja Kerja Kayu	:	1 Buah
25.	Meja Kerja Pegawai	:	9 Buah
26.	Meja Rapat Pejabat	:	2 Buah
27.	Meja Rapat	:	2 Buah

28.	Meja Resepsionis	:	1 Buah
29.	Mesin Ketik	:	1 Buah
30.	Microphone	:	-
31.	P.C Unit	:	8 Unit
32.	Papan Pengumuman	:	1 Buah
33.	Portable Air Conditioner	:	-
34.	Portable Generating Set	:	-
35.	Printer	:	8 unit
36.	Rak Besi	:	1 Buah
37.	Rak Kayu	:	4 Buah
38.	Scanner	:	2 Unit
39.	Sofa	:	4 Buah
40.	Sound System	:	2 Unit
41.	Televisi	:	1 Unit
42.	Wireless	:	1 Buah
43.	CCTV	:	1 Unit

Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Palimanan Tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indicator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 6 (enam) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Palimanan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.2.680.641.300,00 dengan realisasi sejumlah Rp.2.447.914.198,00 atau 91,32%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.232.727.102,00. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian realisasi penggunaan anggaran Tahun 2025 dapat di lihat di dalam tabel ini.

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.	BELANJA DAERAH	Rp.2.680.641.300,00	Rp.2.447.914.198,00	91,32
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp.2.612.062.300,00	Rp.2.379.532.498,00	91,10
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp.2.223.593.000,00	Rp.1.998.471.971,00	89,88
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.388.469.300,00	Rp.381.060.527,00	98,09
5.2.	BELANJA MODAL	Rp.28.579.000,00	Rp.28.579.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.40.000.000,00	Rp.39.802.700,00	99,51

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Pada Tahun 2024 Kecamatan Palimanan, Catatan Hasil Evaluasi Riveu atas Evaluasi Laporan Auntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Palimanan dengan Nilai 64,05 dengan Kategori baik, namun ada beberapa Saran/Rekomendasi temuan dalam rangka perbaikan kinerja namun sudah ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja.

No	Saran/Rekomendasi	TindakLanjut
	Catatan Hasil Reviu Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 pada Kecamatan Palimanan	
1.	Membuat Dokumen Berita Daerah Perkada tentang Perubahan Renja SKPD.	Dari Hasil Evaluasi AKIP terdapat 4 saran/ rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
2.	Membuat dokumen rekapitulasi penerimaan TPP berdasarkan pencapaian kinerja organisasi dan pegawai	
3.	Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja denga target kinerja jangka menengah	
4.	Melakukan penilaian mandiri dengan dilengkapi dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sakiip bulanan/tirwulanan	

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palimanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

Akuntabilitas keuangan dipaparkan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan, perangkat daerah juga telah melakukan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Perangkat daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor tersebut sasaran dapat dicapai lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpadu dan komprehensif.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Bab2Berisi:

- 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
- 2. Steragi Arah Kebijakan
- 3. Struktur Program dan Kegiatan
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Memasuki Tahun terakhir peride Renstra 2025-2026, Kecamatan Palimanan menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026. Renstra Kecamatan Palimanan merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Palimanan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamaan Palimanan Tahun 2025-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2019-2024).

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah di tuangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025- 2026, berikut ini adalah Tabel Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026:

Visi Misi Kepala Daerah Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	VISI: -							
1	-							
1.1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kinerja: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	4,85 Persen	5,08	5,30	5,70	5,70
1.1.1		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	Kinerja: Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rumus Perhitungan: (PDRB sektorSektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n - PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1)/PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 * 100	2,13 Persen	4,41	4,63	4,86	4,86
			Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan Rumus Perhitungan: (PDRB sektor industri pengolahan tahun n - PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1)/PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1 * 100	5,38 Persen	5,39	5,43	5,70	5,70

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tolok Ukur: Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rumus Perhitungan: (PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n - PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n-1)/PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n-1 * 100	2,02 Persen	2,54	2,66	2,80	2,80
			Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Rumus Perhitungan: (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1)/PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1 * 100	7,64 Persen	8,46	8,88	9,32	9,32
			Kinerja: Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB), Tolok Ukur: Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB) Rumus Perhitungan: Nilai PMTB	17.130,00 Milyar Rp	17.230,00	17.418,38	18.289,30	18.289,30

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2		Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kinerja: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Rumus Perhitungan: (Indeks Ruas Jalan dalam kondisi baik x 30 %)+(Indeks tanam x 20%)+(Indeks Pemenuhan SPM PU x 15 %) + (Indeks Pemenuhan Prasarana Perhubungan x 25%) + (Pemukiman tanpa kumuh x 10%)	88,53 Nilai	88,93	89,23	89,81	89,81
			Kinerja: Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa, Tolok Ukur: Indeks Desa Membangun (IDM) Rumus Perhitungan: $\frac{IKE + IKS + IKL}{3}$	0,78 Nilai	0,79	0,81	0,83	0,83
1.1.3		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kinerja: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tolok Ukur: Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Rumus Perhitungan:	56,96 Nilai	60,80	62,74	64,74	64,74
			Kinerja: Menurunnya Risiko Bencana Daerah, Tolok Ukur: Indeks Risiko Bencana Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BNPB	144,56 Persen	142,50	140,25	138,50	138,50
1.1.4		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketahanan Pangan Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Badan Pangan Nasional	82,03 Nilai	82,20	82,60	83,26	83,26

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2		Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Kinerja: Meningkatnya derajat pembangunan manusia, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	71,81 Poin	72,75	73,65	74,53	74,53
1.2.1		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya derajat pendidikan daerah, Tolok Ukur: Indeks Pendidikan Rumus Perhitungan: $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	59,93 Nilai	60,42	61,26	62,11	62,11
			Kinerja: Meningkatnya budaya literasi masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Perpustakaan Nasional	2,09 Nilai	4,42	5,42	6,42	6,42
1.2.2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat, Tolok Ukur: Usia Harapan Hidup (UHH) Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPS	74,71 Usia	74,95	75,20	75,45	75,45
			Kinerja: Meningkatnya pembangunan gender daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketimpangan Gender Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPS	0,45 Nilai	0,43	0,40	0,38	0,38
1.2.3		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Kinerja: Menurunnya tingkat kemiskinan, Tolok Ukur: Angka Kemiskinan Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	11,20 Persen	10,84	10,50	9,75	9,75

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Tolok Ukur: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	7,65 Persen	7,10	6,65	6,10	6,10
			Kinerja: Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, Tolok Ukur: PDRB Perkapita Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	25.970,00 Juta Rupiah	27.493,16	27.493,16	30.892,34	30.892,34
			Kinerja: Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Gini Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	0,35 nilai	0,34	0,33	0,32	0,32
1.3		Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Kinerja: Meningkatnya kinerja sistem tata kelola pemerintahan, Tolok Ukur: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Rumus Perhitungan: perhitungan berdasarkan permenpanRB	67,83 Poin	68,00	69,00	70,00	70,00
1.3.1		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Nilai SAKIP Rumus Perhitungan: Nilai AKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	67,84 Nilai	68,00	68,50	69,00	69,00

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Terpenuhinya target opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tolok Ukur: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPK	4,00 Opini	4,00	4,00	4,00	4,00
			Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem pengendalian instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Maturitas SPIP Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPKP	3,00 Level	3,00	3,00	3,00	3,00
			Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, Tolok Ukur: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Rumus Perhitungan: Perhitungan Kemenkominfo	3,07 Nilai	3,20	3,25	3,27	3,27
1.3.2		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya kualitas kebijakan daerah, Tolok Ukur: Indeks Kualitas Kebijakan Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	0,00 Nilai	0,00	50,00	60,00	60,00
			Kinerja: Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Rumus Perhitungan: Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat	84,25 Nilai	86,25	87,50	88,75	88,75

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Meningkatnya kualitas profesionalisme ASN, Tolok Ukur: Indeks Profesionalisme ASN Rumus Perhitungan: Perhitungan dari aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	75,52 Nilai	75,00	76,50	78,00	78,00
			Kinerja: Meningkatnya Inovasi Daerah, Tolok Ukur: Indeks Inovasi Daerah Rumus Perhitungan: Hasil Perhitungan Sistem Inovasi Daerah dari Kemendagri	47,15 Nilai	57,00	58,00	60,00	60,00
			Kinerja: Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, Tolok Ukur: Rasio Kemandirian Fiskal Rumus Perhitungan: $\text{Rasio Fiskal Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	0,19 Nilai	0,20	0,21	0,22	0,22
1.4		Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Kinerja: Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah Rumus Perhitungan: = Rata-Rata Pencapaian Indikator Sasaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	0,00 Nilai	0,00	60,00	65,00	65,00
1.4.1		Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Kinerja: Meningkatnya kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Kondusifitas Wilayah (IKW) Rumus Perhitungan: (Rasio Penyelesaian Konflik Sosial + Rasio Penyelesaian Tindakan Antir Umur Beragama + Rasio Pelanggaran Norma Agama, Sosial dan Adat)	0,00 Nilai	84,34	84,84	85,34	85,34

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Kinerja: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Rumus Perhitungan:	0,00 Nilai	52,00	53,00	54,00	54,00

(Sumber : RPD Kabupaten Cirebon 2025-2026)

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Palimanan mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terselenggaranyatatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa dengan indikator capaian sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Palimanan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Palimanan selama 5 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Palimanan
Tahun 2025-2026.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Point	87,50	88,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.		Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Point	0,83	0,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikordinasikan oleh kecamatan	Persen	71,00	72,00	0,00	0,00	0,00
			Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	16,66	25,00	0,00	0,00	0,00
		Meningkatkan Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	68,50	69,00	0,00	0,00	0,00
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Susukan Lebak	LKIP Kecamatan	Nilai	75,00	80,00	0,00	0,00	0,00

2.2StrategidanArahKebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran,maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan Menyusun Strategi dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Palimanan Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Optimalisasi Manajemen Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Penyederhanaan Mekanisme dan Standar Pelayanan
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa	Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pemerintah Desa	Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan secara Profesional dan Inovatif
		Penguatan kondusifitas wilayah lingkup Kecamatan	Penguatan forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam kondusifitas wilayah

2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Sasaran Kecamatan Palimanan Tahun 2025 maupun Program dan Kegiatan Pendukung sebagaimana Tabel berikut :

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
BELANJA DAERAH		2.680.641.300	2.447.914.198	232.727.102	91,32
BELANJA NON URUSAN		2.304.206.000	2.072.395.648	231.810.352	89,93
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.372.785.000	2.140.777.348	232.007.652	90,22
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	983.800	983.800	-	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	374.000	374.000	-	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	609.800	609.800	-	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.224.388.100	1.999.267.071	225.121.029	89,87

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.223.593.000	1.998.471.971	225.121.029	89,87
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	358.300	358.300	-	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	436.800	436.800	-	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.344.200	49.344.200	-	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.088.000	2.088.000	-	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.579.000	28.579.000	-	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.648.800	2.648.800	-	100
4	Penyediaan Bahan/Material	9.863.400	9.863.400	-	100
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.805.000	2.805.000	-	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000	3.060.000	-	100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000	300.000	-	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.832.500	24.237.437	6.595.063	78,61
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.862.500	18.267.437	6.595.063	73,47
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.970.000	5.970.000	-	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	39.802.700	197.300	99,50

1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	39.802.700	197.300	99,50
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.166.300	51.104.740	61.560	99,88
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.236.400	27.142.140	94.260	99,65
BELANJA USURAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN		305.246.300	298.526.850	6.719.450	97,79
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	138.710.800	138.270.490	440.310	99,68
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.353.000	42.205.330	147.670	99,65
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.231.000	5.231.000	-	100
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.122.000	36.974.330	473.120	98,98
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	46.428.000	46.229.620	198.380	99,57
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.428.000	46.229.620	198.380	99,57
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	49.929.800	49.835.540	94.260	99,81

21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	49.929.800	49.835.540	94.260	99,81
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80.926.000	80.872.590	53.410	99,93
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.326.200	68.272.790	53.410	95,32
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.326.200	68.272.790	53.410	99,92
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12.599.800	12.599.800	-	100
1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	12.599.800	12.599.800	-	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65.298.000	65.072.270	225.730	99,65
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	65.298.000	65.072.270	225.730	99,65
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	65.298.000	65.072.270	225.730	99,65
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.311.500	20.311.500	-	100
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.311.500	20.311.500	-	100

1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.311.500	20.311.500	-	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.610.000	2.610.000	-	100
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.610.000	2.610.000	-	100
25	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.610.000	2.610.000	-	100

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada bawahannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Palimanan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Persen	87,5
1.1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0,83
1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	71
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	16,66
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68,5
2.1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

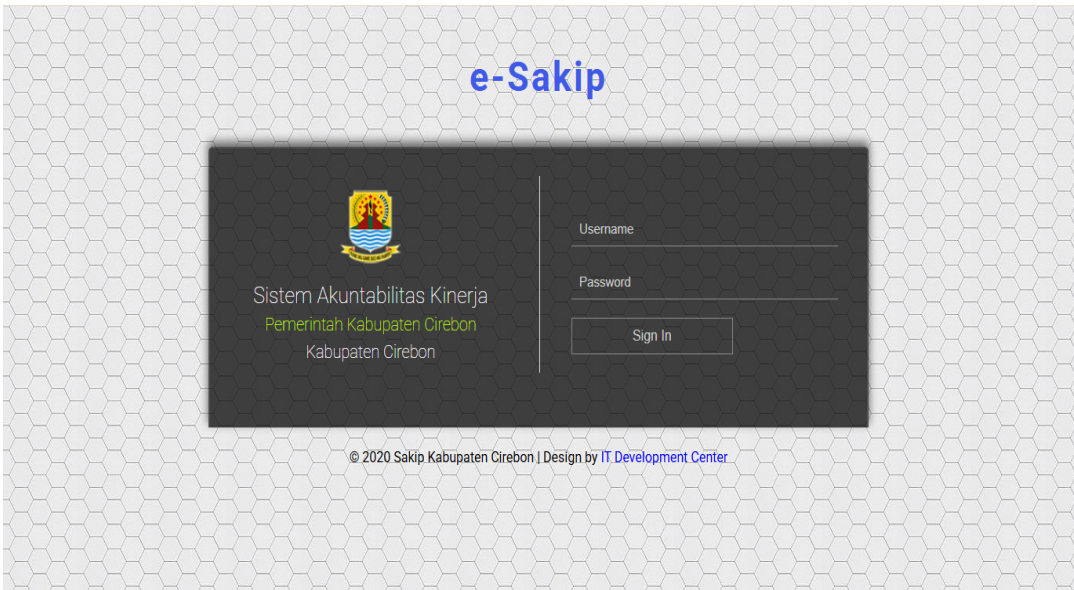
Anggaran belanja Kecamatan Palimanan Tahun 2025 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel: Anggaran Belanja per Sasaran Strategis:

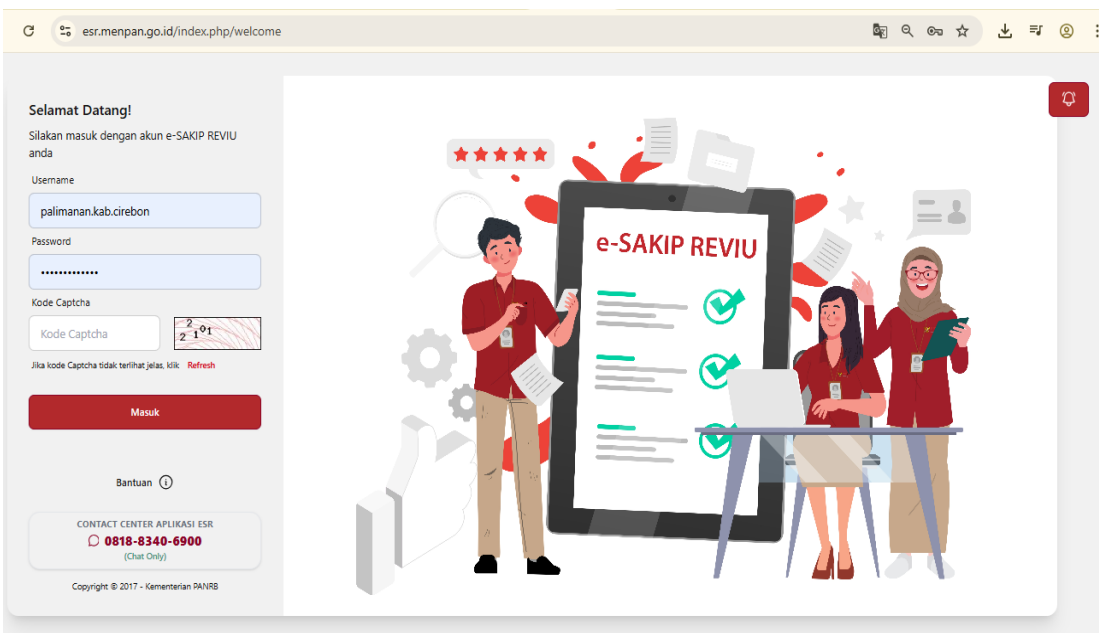
NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Rp80.926.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Rp226.930.300,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan	Rp2.372.785.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.5 Instrumen Pendukung

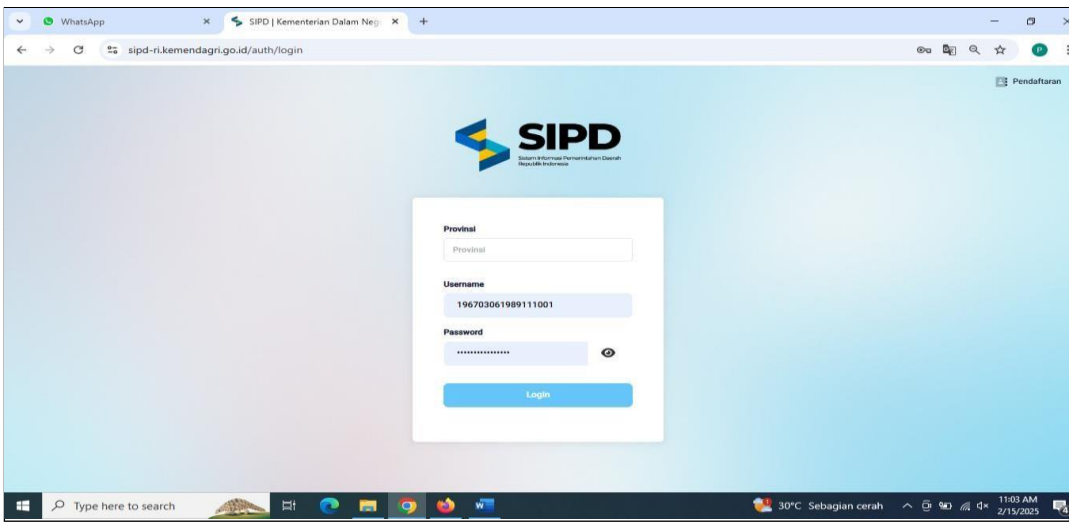
- 1. Instrumen Pendukung Penerapan Sistem akuntabilitas Kinerja Pemernitah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi E SAKIP cirebonkab.go.id yang didalam nya memuat Data terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja.



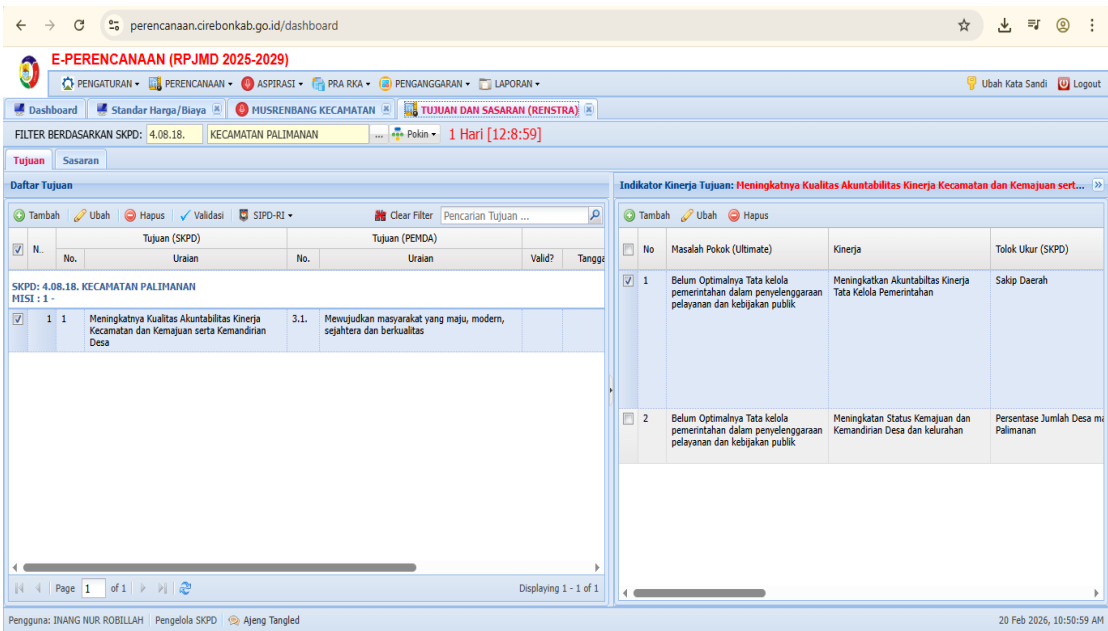
- 2. e-SAKIP REVIU adalah system aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan inter aktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) digunakan untuk menyusun, mengelola, dan melaporkan data perencanaan, keuangan, dan pembangunan daerah, SIPD RI juga dapat memantau progres penyusunan dokumen perencanaan daerah, Fungsi SIPD RI, Membantu menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan daerah dan memantau secara real-time progres penyusunan dokumen perencanaan daerah memastikan data dan informasi pembangunan daerah dapat digunakan secara berbagi pakai oleh instansi terkait, SIPD RI dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



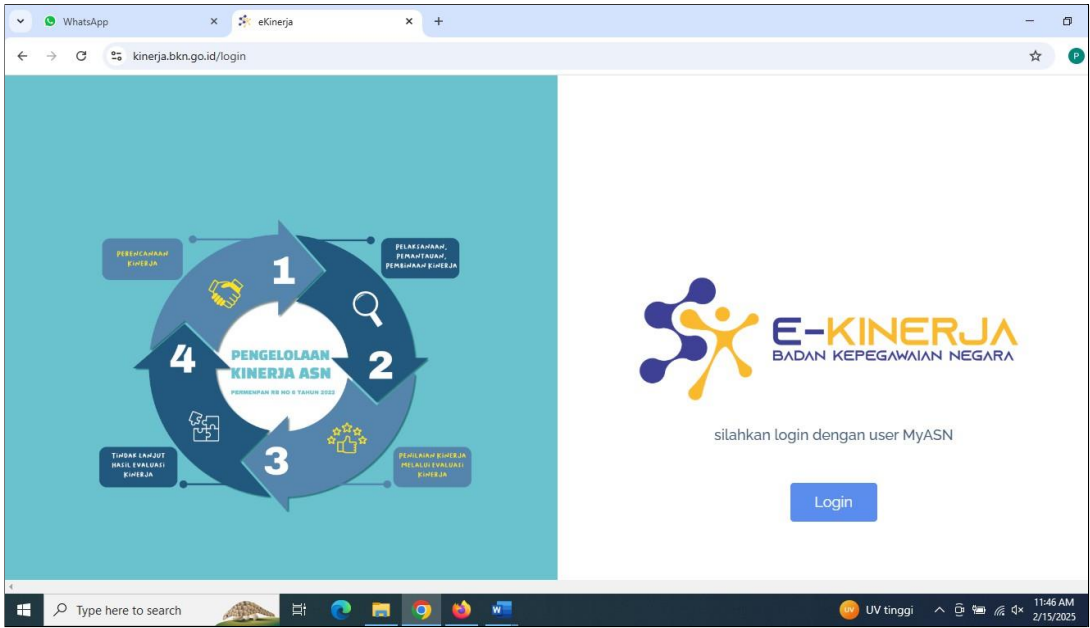
4. Aplikasi e-perencanaan Kabupaten Cirebon berfungsi untuk menyusun rencana kerja dan kebijakan umum. Aplikasi ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, Mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.



5. Aplikasi SIMONEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja) Kabupaten Cirebon berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja. Aplikasi ini mendukung kinerja perangkat daerah di Kabupaten Cirebon.

No	Nama SKPD	Jml. Prg	Jml. Keg	Anggaran		
				Pagu	Serapan	Rasio
1	DINAS PENDIDIKAN	12	123	309.743.491.043.00	52.916.830.773.00	16.96 %
2	DINAS KESADAYAN	22	199	386.766.456.888.00	293.854.856.474.00	73.55 %
3	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PEMANTAN RUANG	15	84	128.293.881.216.00	82.226.129.887.00	59.16 %
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERTANJARAN DAN PERTANAHAN	15	83	33.990.987.300.00	29.590.557.900.00	86.19 %
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAGA	10	34	8.605.061.800.00	7.267.876.838.00	83.50 %
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	6	29	7.116.917.200.00	6.255.577.878.00	87.45 %
7	DINAS SOSIAL	12	50	8.558.164.960.00	6.973.845.478.00	74.31 %
8	DINAS KETANAMAN PANGAN	5	26	4.023.045.188.00	3.746.366.411.00	91.73 %
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	39	36.010.884.800.00	20.665.814.566.00	60.06 %
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10	43	6.107.888.700.00	4.073.334.250.00	66.73 %
11	DINAS PEMERIKSAAN MADYAKARYA DAN DESA	8	42	3.466.481.864.00	1.795.350.477.00	51.19 %
12	DINAS PENGENDALIAN PENCUCUK, KELUARGA BERENCANA, PEMERIKSAAN PEREMPUAN DAN PENGENDALIAN KAMAR	18	86	13.683.412.200.00	12.016.817.708.00	91.84 %
13	DINAS PERKUBURAN	11	48	54.022.918.900.00	45.136.164.384.00	83.55 %
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	39	10.545.856.200.00	7.019.609.719.00	66.56 %
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KEJIL, DAN MENENGAH	10	39	7.803.738.000.00	5.764.674.789.00	73.90 %
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	38	2.960.732.000.00	2.870.764.218.00	96.96 %
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	16	49	7.380.984.200.00	6.360.368.961.00	73.82 %
18	DINAS KEARIFAN DAN PERPUSATKARAN	8	40	1.360.005.144.00	1.266.205.924.00	92.71 %

6. Aplikasi E-Kinerja BKN berfungsi untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini juga membantu dalam pengambilan keputusan manajemen, Manfaat Aplikasi E-Kinerja BKN adalah untuk memudahkan pengelolaan kinerja ASN, mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SK serta menjadi dasar pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).



BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi:

- 1. Capaian Kinerja Tahun 2025
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.1. Capaian KinerjaTahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 diperoleh dari evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada perjanjian kinerja Kecamatan Palimanan. dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91≤100	SangatBaik
2.	75≤90	Tinggi
3.	66≤75	Sedang
4.	51≤65	Rendah
5.	≤50	SangatRendah

Sumber:PermendagriNomor86Tahun2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Palimanan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Palimanan beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATORKINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa		Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Ponit	0.83	0.76	91,33%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100%
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum		Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/ dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	71	71	100%
			Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	16.66	16.66	100%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	100	100%
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100	100	100%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	Persen	50	50	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan		Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75	64.05	85,40%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	80	100%

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target dan Realisasi Tahun 2025			Target dan Realisasi Akhir Renstra Tahun 2025			Perbandingan Realisasi Renstra dengan RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
1.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	86.25 %	86.25%	100%	87.50 Point	85.59 Point	97.82%	87.50 Point	85.59 Point	97.82%	87.50 Point	85.59 Point
1.1.1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	0.82 Point	0.82 Point	100%	0.83 Point	0.76 Point	91.33%	0.83 Point	0.76 Point	91.33%	0.83 Point	0.76 Point
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/ dikoordinasikan oleh kecamatan	70%	70%	100%	71%	71%	100%	71%	71%	100%	71%	71%
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	8.33%	8.33%	100%	16.66%	16.66%	100%	16.66%	16.66%	100%	16.66%	16.66%

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
1.2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	80%	80%	100%	68.50 Nilai	66.20 Nilai	96.64 %	68.50 Nilai	66.20 Nilai	96.64 %	68.50 Nilai	66.20 Nilai
1.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan	Nilai LAKIP Kecamatan	4 Point	4 Point	100%	75 Nilai	64.05 Nilai	85,50%	75 Nilai	64.05 Nilai	85,50%	75 Nilai	64.05 Nilai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	80%	80%	100%	80%	80%	100%	80%	80%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Palimanan yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni :

- 1. Indeks Ketahanan Sosial;
- 2. Indeks Ketahanan Ekonomi; dan
- 3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks desa Membangun, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Rata-Rata IDM Desa se Kecamatan

Kecamatan Palimanan dalam hal ini sangat berperan penting dalam menentukan status desa, pada Tahun 2025 Kecamatan Palimanan ada 5(lima) Desa yang berstatus mandiri, dan 7 (tujuh) Desa yang berstatus maju.

Kinerja sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2024	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
IndeksDesa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	0.810 Point	0.83	0.76	91,33 %

IDM Kecamatan Palimanan pada tahun ke tahun mengalami penurunan, data tersebut di dapatkan dari pendamping desa yang bertugas di desa se wilayah kecamtan Palimanan dimana pada Tahun 2025 target 0.83 point tecapai 0.76 point dengan angka capaian 91,33% dan masuk dalam kategori di tingkat kecamatan dengan katagori maju.

Pada Tahun 2025 indikator Kinerja sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) tidak didukung oleh anggran dan tidak mempunyai target kinerja, hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian sasaran yang telah di tetapkan, dengan komitmen dari pegawai kecamatan Palimanan sehingga target kinerja tersebut bisa tercapai secara keseluruhan desa yang ada diwilayah kecamatan Palimanan IDM Kecapatan Palimanan memperoleh nilai 0,76 dengan kategori maju. hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor.

Ada beberapa Faktor dalam rangkamenunjang indikator sasaran Indeks Desa Membangun di Kecamatan Palimanan pada Tahun 2025 diantaranya:

FaktorPendorong:

1. Adanya Petugas pendamping Desa di setiap desa untuk menilai status Desa
2. Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa dengan Kecamatan

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
2. Rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Desa membangun
3. Kurangnya dukungan masyarakat tentang pemberdayaan di Desa

Tindak lanjut :

1. Mengadakan Bimbingan Teknis tentang Desa Membangun
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Musrenbang ditingkat kecamatan
3. Mendorong Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan Infarstuktur di desa.

INDIKATOR KINERJAPROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Indeks Desa Membangun terdiri dari 1 (satu) program yang sudah ditetapkan dalama dokumen rencana strategis kecamatan Palimanan tahun 2025-2026, progam

tersebut adalah:

NO	Program	Indikator	FormulaIndikator
1	2	3	4
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan di bagi jumlah kegiatan dalam progam tahun rencana (%)

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100 %	Rp80.926.000,00	Rp80.872.590,00	99,93%	
	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarkat Desa	1 Jenis	1 Jenis	100 %	Rp68.326.200,00	Rp68.272.790,00	99,92%	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Keluarga	12 Keluarga	100 %	Rp12.599.800,00	Rp12.599.800,00	100%	

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2

3.2.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan letak dan kondisi georgrafis daerah perlu memaksimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik Kecamatan mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. Tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mempunyai peran :

1. Mengevaluasi Peraturan Desa : Rancangan Peraturan APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Camat mempunyai waktu 20 hari terhitung sejak diterimanya Perdes untuk dievaluasi.
2. Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifiksidengan membentuk Tim Klarifikasi palaing lambat 30 hari sejak diterimanya

Perdes.

- 3. Menjaga Kondusifitas wilayah di Kecamatan
- 4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Camat juga melakukan koordinasi pendampingan dalam penyusunan perencanaan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan mengelola sumber daya desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. Penyelarasan dilakukan dengan jalan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurang-kurangnya:RPMJD Kabupaten,rencana strategis OPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rinician Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum.

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/ dikoordinasikan oleh kecamatan	(Jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/jumlah Pelanggar Perda di Kecamatan)* 100 %
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	(Persentase Jumlah Desa yang Tepat Waktu Penetapan RKPDes + Persentase Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam penetapan APBDes)/2

Kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2024	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/ dikoordinasikan oleh kecamatan	(Jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/jumlah Pelanggar Perda di Kecamatan)* 100 %	70.00%	71.00%	71.00%	100%

Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	(Persentase Jumlah Desa yang Tepat Waktu Penetapan RKPDes + Persentase Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam penetapan APBDes)/2	8.33%	16.66%	16.66%	100%
--	---	-------	--------	--------	------

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/ dikoordinasikan oleh kecamatan dan Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu yang dilaksanakan padaTahun 2025 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2024, hal ini sesuai dengan target pada Renstra kecamatan Palimanan Tahun 2025 - 2026, kenaikan capaian kinerja tersebut didukung dengan capain kinerja program yang rata rata capaiannya 100% pada Tahun 2025, berikut adalah data capaian kinerja program.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum terdiri dari 4 (empat) program yang sudah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis kecamatan Palimanan tahun 2025-2026, progam tersebut diantaranya :

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan di bagi jumlah kegitan dalam progam tahun rencana (%)
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja kegiatan di bagi jumlah kegitan dalam progam tahun rencana (%)
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan di bagi jumlah kegitan dalam progam tahun rencana (%)
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	Rata-rata capaian kinerja kegiatan di bagi jumlah kegitan dalam progam tahun rencana (%)

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 2(dua) didukung oleh 4 (empat) program yaitu dan 6 (enam) kegiatan, dimana kegiatan tersebut

sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya:

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditanga Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/ dikoordinasikan oleh kecamatan ni/ dikoordinasikan oleh kecamatan Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100 %	Rp65.298.000,00	Rp65.072.270,00	99,65 %	
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Jenis	1 Jenis	100 %	Rp65.298.000,00	Rp65.072.270,00	99,65 %	
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100 %	Rp138.710.800,00	Rp138.270.490,00	99,68 %	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Jenis	2 Jenis	100 %	Rp42.353.000,00	Rp42.205.330,00	99,65 %	
	Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Jenis	1 Jenis	100 %	Rp46.428.000,00	Rp46.229.620,00	99,57 %	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Jenis	1 Jenis	100 %	Rp49.929.800,00	Rp49.835.540,00	99,81 %	
	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100 %	Rp20.311.500,00	Rp20.311.500,00	100%	
	Kegiatan Penyelenggaran	1 Jenis	1 Jenis	100	Rp20.311.500,00	Rp20.311.500,00	100%	

Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			%			
	50%	50%	100 %	Rp2.610.000,00	Rp2.610.000,00	100%
	50%	50%	100 %	Rp2.610.000,00	Rp2.610.000,00	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

Ada beberapa Faktor Dalam rangka menunjang indikator sasaran sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum pada Tahun 2025 diantaranya:

FaktorPendorong:

1. Adanya Undang–Undang yang mengatur secara khusus tentang Pemerintahan Desa yaitu Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Adanya Peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana yang di Kelola oleh Pemerintah Desa.
3. Adanya Aset Desa yang bisa dikelola sebagai Pendapatan Asli Desa

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa.
2. Apartur di desa banyak yang belum memahami Peraturan tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
3. Tidak tertibnya Pencatatan Administrasi Aset Desa.

Tindak Lanjut:

1. Rekrutmen Aparatur Pemerintahan Desa harus di utamakan bagi perangkat desa yang mempunyai pengetahuan dan mempuyai keahlian dalam administrasi perkantoran.
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pertuaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Pembinaan dan Fasiltasi tentang Pencatatan Aset Desa.



Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi
Kepedudukan Tahun2025



Sosialisasi PeraturanTentang Desa Tahun 2025



Rapat Pembinaan Penegakan Perda
Tahun 2025

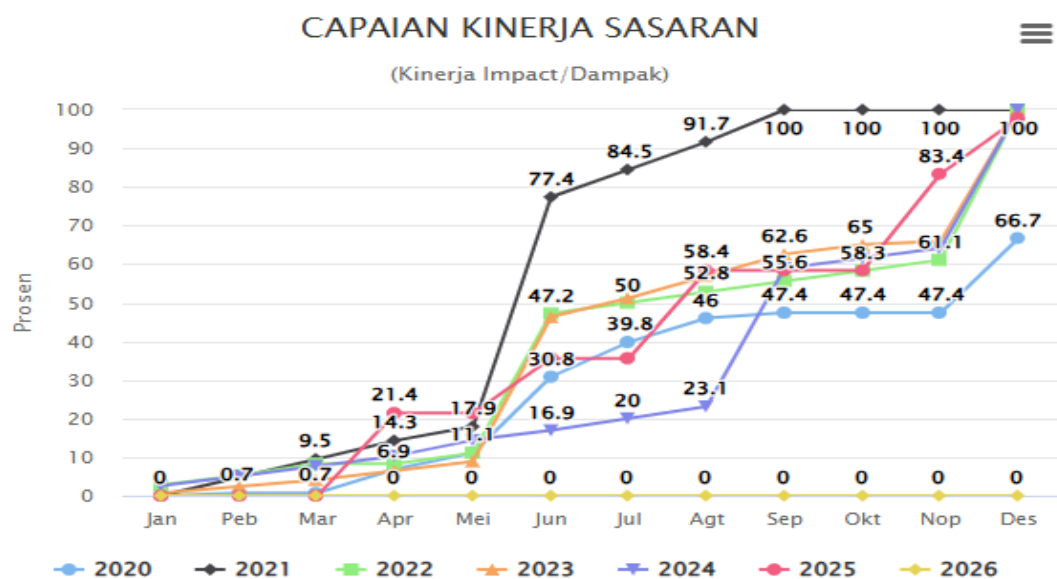


Foto Monev Bantuan Keuangan
Desa Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA SASARAN 3

3.2.3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan menggunakan Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur tingkat Kepuasan masyarakat dalam pelayanan yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan cara ini, masyarakat diberikan kesempatan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diselenggarakan suatu unit kerja. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah : partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. dalam konteks pembangunan sistem administrasi Negara. Reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di bawah ini adalah Grafik Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Kecamatan Palimanan dari Tahun 2021 - 2025. Dimana salah satu indikator sasaran kinerja yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.



Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel:Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Sasaran
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai LKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2024	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai LKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	4 Point	75 Nilai	64.05 Nilai	85,40%

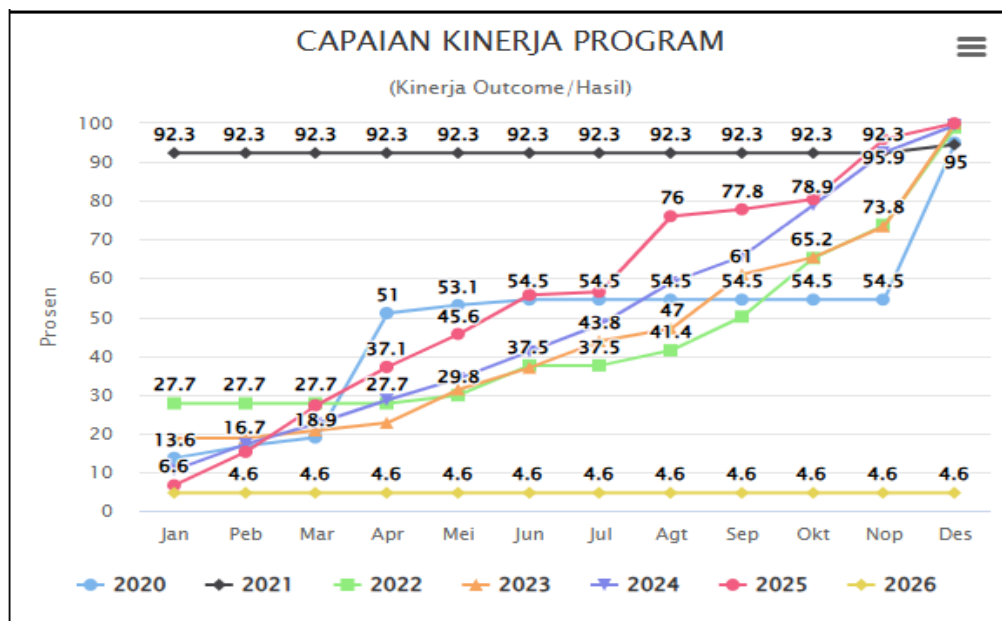
INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Tingkat Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rumus indikator kinerja Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total nilai unsur yang terisi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{15 \text{ Layanan}}{15 \text{ layanan}} \times 100\%$$



Dukungan untuk tercapainya kinerja Sasaran 3 diperoleh dari indikator kinerja program Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan. Tingkat keberhasilan pada indikator program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 100%.

Faktor Pendorong:

1. Adanya Survei IKM dengan menggunakan Google Form dengan alamat link : <https://bit.ly/SKM2025SemesterII>
2. Adanya Sumber daya Aparatur yang bisa mengarahkan Pemohon Pelayanan untuk mengisi IKM.
3. Ruang Pelayanan Umum yang lebih Respentatif.

4. Tersedianya Blanko KTP dan KK.

Faktor Penghambat:

- 1. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan seperti (Komputer, Printer, Scanner, CCTV dan lain lain).

Solusi:

- 1. Menganggarkan belanja untuk sarana dan prasarana pelayanan umum

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 3(tiga) didukung oleh 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efisiensi penggunaan sumber daya :

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Tingkat Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80%	80%	100%	Rp2.372.785.000,00	Rp2.140.777.348,00	90,22%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	100%	Rp983.800,00	Rp983.800,00	100%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100%	Rp2.224.388.100,00	Rp1.999.267.071,00	89,88%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	100%	Rp49.344.200,00	Rp49.344.200,00	100%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis	1 Jenis	100%	Rp40.000.000,00	Rp39.802.700,00	99,51%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	100%	Rp30.832.500,00	Rp24.237.437,00	78,61%	

Gambar, Foto Pelayanan Umum kecamatan Palimanan Tahun 2025



BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi:

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan pada Kecamatan Palimanan Tahun 2025 merupakan tahun ke 5 (Lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Palimanan Tahun 2025-2026, Keberhasilan yang di capai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. hasil laporan kinerja Kecamatan Palimanan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari 3 sasaran, yaitu yang pertama Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dengan indikatornya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100), persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 91,33%, yang kedua Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum, dengan indikatornya Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/ dikoordinasikan oleh kecamatan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100%, indikator kedua dari sasaran kinerja dalah Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100% dan yang ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan, dengan indikatornya Nilai LAKIP Kecamatan, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 85,40%.

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja. Langkah- langkah perbaikan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Menganggarkan sarana dan prasarana pelayanan umum
3. Memperbaiki Bangunan/Gedung kantor
4. Meningkatkan kemampuan ASN dengan mengikuti Bimtek atau Pelatihan
5. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6. Melaksanakan Pembinaan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Apartur Pemerintahan Desa
7. Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
8. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
9. Meningkatkan Keamanan diwilayah Kecamatan
10. Mendorong peningkatan Status Desa menjadi Desa Mandiri
11. Melakukan Pembinaan bagi Peserta MTQ tingkat Kabupaten
12. Memperkuat Fungsi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

Melalui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palimanan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya LkjIP Kecamatan Palimanan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain khususnya Kecamatan Palimanan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan pada visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi.

Semoga LkjIP Kecamatan Palimanan diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.

Palimanan, Februari 2026

Pit. CAMAT PALIMANAN,



NIP. 19711218 199703 1 003